

# Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir melalui De-Kriminalisasi Ruang Publik

Tarcisius Yoyok W. Subroto

Laboratorium Perancangan Arsitektur, Antropologi Arsitektur, Program Studi Arsitektur, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

## Abstrak

Kecenderungan rusaknya kawasan tepian laut/ pesisir di Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan angka yang semakin tinggi. Hal tersebut terjadi tidak lepas dari adanya aksi-aksi pembangunan yang kurang memperhatikan eksistensi tepian laut/ pesisir sebagai wilayah yang perlu dipertahankan keseimbangan ekologisnya. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi pengembangan kawasan tepian laut/ pesisir berdasarkan teori dengan menggunakan kasus empiris di Kabupaten Nias Selatan (2015) dan kasus keberhasilan pengembangan ruang kawasan tepian laut/ pesisir di kota Yokohama, Jepang (2014). Metode yang digunakan dalam menganalisis kondisi kawasan tepian laut/ pesisir ini adalah metode telaah literatur dan survei lapangan yang dilakukan pada kurun waktu 2014-2015 di 4 (empat) lokus pantai/ pesisir di Nias Selatan, Indonesia yaitu pantai Sorake, pantai Lagundri, pantai Baloho dan pantai Teluk Dalam, sedangkan di Yokohama, Jepang diambil lokus di Harbour Front City, Yokohama. Data dikumpulkan secara langsung di lapangan dilengkapi dengan wawancara kepada pemangku kepentingan (stake-holder). Data terkait dengan fenomena dan fakta yang ada di lapangan kemudian dianalisis secara deduktif dan diverifikasi terhadap teori terkait. Hasil analisis data menunjukkan bahwa de-kriminalisasi pengembangan kawasan tepian laut/ pesisir dapat direalisasikan menggunakan strategi pengembangan yang secara khusus menekankan 6 (enam) aspek yang perlu diprioritaskan khususnya dalam membangun ruang publik di kawasan tepian laut/ pesisir.

**Kata-kunci** : alam, budaya, de-kriminalisasi, lingkungan-binaan, pesisir

## Pengantar

Pesisir yang merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan laut sering dipersepsikan sebagai kawasan paling strategis untuk memberikan peluang kehidupan bagi masyarakatnya. Alasan yang paling logis yang dapat menjelaskan hal itu adalah bahwa laut bagi masyarakat pesisir menyediakan hasil laut yang dapat 'menjamin' kemenerusan kehidupannya secara turun temurun. Kawasan tepian laut/ pesisir yang kemudian dihuni secara tradisional dalam bentuk kampung/ desa nelayan dalam prosesnya lalu membentuk komunitas lebih berorientasi pada aspek kehidupan sosio-kultural. Masyarakat pesisir yang notabene memiliki jumlah sekitar 60% dari jumlah penduduk Indonesia cenderung miskin karena mereka

sangat bergantung pada sumberdaya kelautan (marine resource based) yang ada sementara tingkat sosial mereka masih cukup rendah. Di sisi lain pada banyak kasus kawasan tepian laut/ pesisir telah dikembangkan menjadi seafont city berbasis kehidupan modern yang lebih berorientasi kepada kepentingan sosio-ekonomi.

Pada kenyataannya, pemanfaatan kawasan pantai/ pesisir dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia telah merubah pantai yang pada awalnya berorientasi alam (natural) menjadi lingkungan binaan (built environment) yang berorientasi buatan (artificial) yang dikembangkan dalam perspektif kuantitatif deterministik. Hal tersebut berpotensi merusak eksistensi alam dan juga manusia termasuk budaya (cultural) yang dimilikinya.

Pemanfaatan kawasan pantai/ pesisir untuk kehidupan manusia dalam batas kewajaran dan terukur pada hakikatnya relatif tidak akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dari habitat yang ada. Dari banyak kasus pemanfaatan kawasan pantai/ pesisir pada umumnya mengarah pada eksploitasi dan ekstraksi sumber daya wilayah pantai. Hal ini akan berdampak negatif yang diakibatkan oleh terjadinya ketidak seimbangan kondisi alam sehingga terjadi pendangkalan kawasan pantai/ pesisir (sedimentasi), kenaikan permukaan air laut (rob) dan abrasi (Gambar 2). Pada banyak kasus eksploitasi dan ekstraksi kawasan pantai/ pesisir tidak jarang menyulut konflik antar pemangku kepentingan (stake holder). Hal itu terjadi karena adanya perbedaan persepsi terhadap eksistensi kawasan pantai/pesisir yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan secara ekonomi jangka pendek.

Persepsi yang muncul di tengah masyarakat terkait dengan pemanfaatan kawasan tepian laut/ pesisir cenderung mengarah pada kondisi yang dikotomis, di satu pihak menginginkan pelestarian kawasan tepian laut/ pesisir di mana kekhasan diprioritaskan namun di pihak lain mengharapkan terjadinya perubahan kondisi kawasan tepian laut/ pesisir agar menjadi lebih baik dalam berbagai aspek yang dilandasi oleh faktor pengembangan ekonomi kawasan.

Cara pandang yang mewakili pemanfaatan kawasan tepian laut/ pesisir jangka pendek sering membawa masalah terkait dengan tarik menarik kepentingan antar para pemangku kepentingan yang tidak jarang mengakibatkan terjadinya praktik kriminalisasi kawasan tepian laut/ pesisir untuk merealisasikan program-program yang pada umumnya berorientasi jangka pendek. Praktik ini cenderung diiringi oleh proses eksploitasi dan ekstraksi keruangannya yang melebihi daya dukung spasial dan lingkungan. Kriminalisasi pada perkembangannya telah mengalami neologisme, yaitu sebuah keadaan di mana kawasan tepian laut/ pesisir dapat dinyatakan (dianggap) sebagai pihak yang boleh dieksploitasi berdasarkan persepsi sepihak.

Isu konflik di wilayah pantai di Indonesia berpotensi membawa pada kondisi pantai yang semakin buruk baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal tersebut telah mempercepat proses rusaknya wilayah pantai karena secara alamiah terjadi pula perubahan karakter fisik spasialnya yang diakibatkan oleh gempa bumi dan atau tsunami dalam skala besar. Diskusi terkait pelestarian wilayah pantai di Indonesia sangat penting tidak hanya karena Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah pantai yang relatif luas sepanjang 81.000 km namun juga di wilayah tersebut dihuni oleh masyarakat pesisir dengan budaya dan cara hidup yang khas yang pada 2015 ini mencapai 144 juta orang.

Masyarakat yang telah hidup secara turun temurun di wilayah pantai tersebut secara eksplisit memiliki kepentingan untuk mengakses laut sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun lebih daripada itu, masyarakat di wilayah pantai tersebut juga memiliki hubungan sosio-psikologis secara komunal yang dibangun melalui proses psiko-kultural sebagai tempat bermukim. Akibatnya tempat hunian mereka – yang bersifat keduniawian (profane)– sulit dipisahkan dengan kehidupan kulturalnya –yang bersifat filosofis (sacred)–. Wilayah pantai yang dikemukakan tersebut pada umumnya memiliki jiwa yang khas yang secara sosio-kultural disebut sebagai lokal genius (genius locus). Wilayah pantai yang pada umumnya dihuni oleh (kelompok) masyarakat tersebut secara inheren memiliki kekhasan atribut baik secara antropologis, sosiologis, psikologis maupun kultural yang kemudian dikenal dengan istilah kawasan pesisir.

Konflik di wilayah pesisir pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir semakin marak terjadi di Indonesia sebagai contoh adalah konflik antara nelayan dan pelaksanaan program reklamasi pantai di wilayah Sario Tumpaan, Manado (Saturi dalam Doaly, 2013); demikian pula kasus serupa dialami oleh kawasan wisata pantai Lagundri, Nias Selatan (Flint, 2015) yang wilayah pantainya mulai rusak. Selain itu kasus penambangan pasir ilegal yang terjadi di Selat Madura, Jawa Timur (Walhi Jawa Timur, 2013) maupun di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

(2015) yang dilatarbelakangi oleh tujuan kapital-ekonomi dengan melakukan pengambilan pasir di kawasan pesisir telah menambah panjang deretan kasus konflik yang terjadi di wilayah pesisir di Indonesia yang memerlukan penanganan serius yang solutif dan holistik.

Diskusi terkait dengan konflik di kawasan pesisir akan mengarahkan tujuan tulisan ini yaitu untuk merumuskan strategi pengembangan kawasan tepian laut/ pesisir berdasarkan teori menggunakan kasus empiris di Kabupaten Nias Selatan (2015) dan kasus keberhasilan pengembangan ruang kawasan tepian laut/pesisir di kota Yokohama, Jepang (2014).

### **Metode**

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Nias Selatan dan Yokohama, Jepang merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisis kondisi kawasan tepian laut/ pesisir ini adalah metode telaah literatur dan survei lapangan yang dilakukan pada kurun waktu 2014-2015 di 4 (empat) lokus pantai/ pesisir di Nias Selatan, Indonesia yaitu pantai Sorake, pantai Lagundri, pantai Baloho dan pantai Teluk Dalam. Sedangkan di Yokohama, Jepang diambil lokus di Harbour Front City. Data dikumpulkan secara langsung di lapangan dilengkapi dengan wawancara terhadap pemangku kepentingan (stake-holder) terkait.

Data dikumpulkan secara langsung di lapangan dilengkapi dengan wawancara kepada pemangku kepentingan (stake-holder). Data terkait dengan fenomena dan fakta yang ada di lapangan kemudian dianalisis secara deduktif dan diverifikasi terhadap teori terkait.

### **Analisis dan Interpretasi**

Pelestarian Kawasan Tepian Laut/ Pesisir (Sea Front)

Perspektif masa depan kawasan tepian laut/ pesisir memandang bahwa kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan tidak hanya sebagai tempat hunian (living space) yang nyaman berorientasi alam dan budaya namun juga difokuskan sebagai pusat berkumpulnya

manusia untuk fungsi-fungsi rekreasi (leisure) publik yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kawasan. Tantangan masa depan kawasan tepian laut/ pesisir sebagai lingkungan binaan (built environment) perlu diarahkan pada penciptaan ruang yang diorientasikan pada keseimbangan 5 (lima) aspek yaitu

(1) ekologi-keruangan,

(2) sosiologi,

(3) antropologi,

(4) kebudayaan dan

(5) ekonomi masyarakat di kawasan tepian laut/ pesisir secara berkelanjutan.

Keseimbangan kelima aspek tersebut ditujukan agar kawasan tepian laut/ pesisir tetap dapat dijaga kualitas dan eksistensi ekologi keruangannya yang memenuhi persyaratan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal tersebut ditujukan agar kawasan tepian laut/ pesisir tetap memberikan peluang kontribusi terhadap kebutuhan sosio-psikologis masyarakat lokal berdasarkan azas equitas (persamaan hak) untuk berperan aktif dalam melestarikan kawasan tepian laut/ pesisir dalam bentuk ikut berperan dalam melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan kawasan tepian laut/ pesisir. Masyarakat lokal membutuhkan kawasan tepian laut/ pesisir yang berkembang secara ekonomi sebagai kawasan binaan baru ( new built environment ) namun tetap berpijak pada lokalitas dan kearifan budaya masyarakatnya.

Seperti disebutkan di atas, masyarakat lokal sebagai 'pemilik' kebudayaan harus diberi peluang untuk menunjukkan eksistensinya dalam ikut mewarnai karakter kawasan tepian laut/ pesisir. Keberadaan lingkungan binaan di kawasan tepian laut/ pesisir jika tidak dikendalikan faktanya secara ekologis akan berpengaruh pada memburuknya kualitas (deteriorated) dan daya dukung (carrying capacity) lingkungan alam. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pengguna kawasan tepian laut/ pesisir yang notabene mengkonsumsi sumber daya alam (lahan dan air tanah) di satu sisi dan di sisi lain

memproduksi sampah lingkungan (limbah kotoran dan visual) yang perlu diminimalisir dampaknya terhadap lingkungan di kawasan tepian laut/ pesisir.

### Sustainability Kawasan Tepian Laut/ Pesisir (*Sea Front*)

Pacione (1997) mengemukakan bahwa ciri komunitas yang handal (*ideal sustainable community*) adalah komunitas yang memiliki integritas lingkungan dengan vitalitas ekonomi yang tinggi serta masyarakat yang mapan. Pemahaman sustainability dalam konteks kawasan tepian laut/ pesisir memuat paradok orientasi berupa:

- (1) sustainability yang berorientasi pada kemenerusan (*continuity*) dan di sisi lain berupa
- (2) sustainability yang berorientasi pada perubahan (*change*).

Menurut Preston (2008) pemahaman sustainability dalam konteks perubahan di-dasari oleh 3 (tiga) hal yaitu kecepatan, prosedural, arah perubahan. Para pemangku kepentingan memiliki andil besar sebagai katalis perubahan yang memuat ketiga hal tersebut di atas apakah akan menjadikan perubahan kawasan tepian laut/ pesisir menjadi lebih baik atau sebaliknya. Pemahaman sustainability dalam konteks kemenerusan nampaknya harus dilihat dalam 2 (dua) perspektif yaitu ke-menerusan budaya yang bermakna *static-end state* (keadaan tetap) dan kemenerusan ekonomi (pembangunan) yang bermakna *change-flow state* (keadaan berubah).

Pada banyak kasus di lapangan, kedua perspektif tersebut cenderung melakukan tarik menarik kepentingan yang kemudiannya terdapat kecenderungan bahwa pemahaman *change-flow state* lebih menunjukkan superioritasnya dibandingkan dengan pemahaman *static-end state* yang justru cenderung menampakkan inferioritasnya. Program pengembangan kawasan tepian laut/ pesisir pada dasarnya juga perlu dikelola dengan baik mengingat daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan binaan kawasan tepian laut/ pesisir memiliki keterbatasan baik secara fisik-keruangan (luasan dan jenis permukaan lahan, daya serap dan sumber daya air) maupun non fisik (ekonomi, sosial dan budaya).



**Gambar 1.** Pusat rekreasi pantai *Harbour Front City of Yokohama*, Jepang (Sumber: Survei 2014)

Indikasi kehidupan (vitalitas) kawasan dapat diukur dari meningkatnya intensitas kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang direfleksikan oleh aktivitas publik baik yang dilakukan secara parsial maupun masif (Gambar 1). Kegiatan yang berlangsung di kawasan tepian laut/ pesisir yang pada umumnya dipandu oleh kepentingan pembangunan ekonomi direfleksikan oleh maraknya pembangunan fasilitas komersial (*shopping mall*, hotel, apartemen) seiring dengan meningkatnya budaya hedonisme masyarakat. Hal ini perlu dikendalikan sesuai dengan kemampuan daya dukung kawasan tepian laut/ pesisir dalam merespon perubahan fisik spasial yang terjadi.

Seperti disebutkan oleh Utomo (2009), Meadows (dalam Berry, et.al., 1993 : 110) menyebutkan bahwa jika pemanfaatan ekonomi kawasan tepian laut/ pesisir berlangsung terus-menerus tanpa pengendalian yang terukur, maka pada saatnya akan terjadi suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi tidak dapat ditingkatkan lagi atau telah mencapai ambang batas tertentu, sementara kemampuan dan kualitas lingkungan (*ecology endowments*) sulit untuk diperbaiki kembali. Inilah yang disebut dengan *the limits to growth*. Selanjutnya ditambahkan bahwa pemanfaatan dan pengembangan kawasan tepian laut/ pesisir tanpa disertai oleh perlindungan lingkungan secara memadai, pemanfaatan dan pengembangannya akan kehilangan makna (*undermined*). Sebaliknya, tanpa pembangunan, upaya perlindungan terhadap lingkungan (binaan) akan menemui kegagalan (Utomo, 2009: 8).

Pada banyak kasus, kawasan tepian laut/ pesisir yang telah berhasil menjadi pusat kegiatan publik pada umumnya kegiatan eksploitasi ruang secara berlebihan justru cenderung dilakukan secara menerus. Bangunan dan kelompok bangunan diciptakan tidak lagi dilakukan secara horisontal namun juga secara vertikal. Hal tersebut justru berakibat buruk terhadap lingkungannya karena eksploitasi ruang tersebut pada saatnya akan menyentuh titik maksimal daya dukung lingkungan yang ada. Akibatnya dapat dicermati bahwa kondisi kawasan tepian laut/ pesisir akan cenderung semakin rusak dan kurang terawat seperti misalnya rusaknya garis pantai, jaringan drainase, jaringan jalan, ruang terbuka publik serta hubungan akses antar ruang publik kawasan tepian laut/ pesisir.

Pada banyak kasus, terjadi pula kawasan tepian laut/ pesisir yang memiliki potensi menjadi pusat kegiatan publik berupa hunian, jasa dan komersial tata kelola ruangnya belum dilengkapi oleh Rencana Tata Lingkungan dan Bangunan (RTBL). Akibatnya sering dijumpai pemanfaatan ruang kawasannya menjadi tidak terarah dan justru kontra produktif terhadap kondisi kawasan tepian laut/ pesisir yang diharapkan. Bangunan dan atau kelompok bangunan tidak saja menyentuh garis pantai namun sudah berada di atas air laut khususnya pada saat air laut pasang. Hal tersebut telah mengakibatkan keseimbangan alam setempat menjadi terganggu.



**Gambar 2.** Dampak abrasi yang terjadi di pantai Sorake (Sumber: Flint, 2015).

Keaslian (authenticity) Kawasan Tepian Laut/ Pesisir (Sea Front)

Keaslian mengandung makna kekhasan (indigenous) yang berorientasi pada nilai dan identitas kawasan tepian laut/ pesisir. Kekhasan kawasan tepian laut/ pesisir perlu dimunculkan

sebagai daya tarik utama untuk tidak saja membedakan dengan kawasan yang lain namun juga untuk mendorong inisiatif masyarakat kawasan tepian laut/pesisir untuk menggali dan mengembangkan lokalitas nilai-nilai budaya yang dimilikinya guna melestarikan kawasan secara fisik keruangan berbasis kearifan lokal. Kasus dikembalikannya Shrine Gate (Pintu Gerbang Kayu Kuil) tua desa nelayan Okuki, Prefecture Aomori, Jepang oleh Pemerintah Amerika Serikat yang hanyut terbawa arus tsunami sejauh 41.000 km dan terdampar di pantai barat negara bagian Oregon Amerika Serikat (NHK World-Japan, 14 Oktober 2015) dan kemudian dibangun kembali di tempat yang sama adalah contoh konkrit yang menunjukkan rasa memiliki (ownership) yang sangat tinggi terhadap kekayaan dan keaslian budaya mereka.

Pada hakikatnya lokalitas kawasan tepian laut/ pesisir harus dijaga keasliannya baik yang berasal dari alam, budaya maupun buatan. Keaslian alam dapat diperoleh dari kehadiran matahari (sun), laut dan ombaknya (sea), pantai (shore) dan pasir (sand). Selain itu dapat juga diperoleh dari sungai, hutan, bukit serta biotanya yang berupa kekayaan flora dan fauna secara alamiah.

Di pihak lain, keaslian budaya dapat diperoleh dari kekayaan arsitektur lokal, kesenian, adat-istiadat, nilai-nilai kearifan lokal, kehidupan sosial maupun sejarah masyarakatnya dalam konteks kawasan tepian laut/ pesisir. Selain potensi keaslian yang sudah ada, objek yang dapat dikembangkan berbasis alam dapat diciptakan dalam bentuk objek buatan berupa atraksi wisata selancar (surfing), menyelam (diving), berlayar (sailing) dan paralayang (paragliding). Kawasan tepian laut/ pesisir yang sensitif terhadap perubahan fisik-keruangan memerlukan perlindungan secara khusus. Hal itu tidak terlepas dari kondisi alam dan biota laut yang rentan terhadap gangguan dari pihak lain terutama manusia pengguna kawasan tepian laut/ pesisir. Keaslian sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks desain kawasan binaan diarahkan menjadi suatu kondisi dimana Lingkungan Binaan (built environment) mampu bersenyawa dengan Lingkungan Alam (natural

environment) dan Lingkungan Budayanya (cultural environment).

Perubahan ruang kawasan tepian laut/ pesisir dari kawasan alami menjadi kawasan terbangun dari waktu ke waktu perlu perencanaan berdasarkan visi-misi, rencana strategi, program pembangunan yang terukur, terstruktur dan sistematis berbasis alam dan budaya lokal. Perkembangan ruang kawasan tepian laut/ pesisir yang hanya berdasarkan trend empiris yang cenderung tumbuh organik tanpa perencanaan akan mengakibatkan kawasan menjadi chaos (tidak terarah) perkembangannya.

Pada kenyataannya pengembangan ruang kawasan tepian laut/ pesisir yang hanya menekankan pembangunan fisik semata akan mengganggu/ merusak keaslian ruang kawasan tepian laut/ pesisir baik secara fisik, spasial, visual maupun kondisi sosio-kultural masyarakat 'pemilik' ruang kawasan tepian laut/ pesisir. Pengendalian bangunan dalam konteks jumlah bangunan, luasan terbangun, luas tidak terbangun, ketinggian bangunan, material bangunan, bentuk bangunan, fungsi bangunan, orientasi bangunan perlu dievaluasi dan dirumuskan kembali setiap 5 (lima) tahun dalam bentuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Hal tersebut ditujukan guna mengantisipasi perkembangan aktual yang terjadi baik secara sosiologis, ekologis maupun demografis. Pada kasus desa-desa nelayan yang tidak memiliki perencanaan terpadu yang akan terjadi adalah perubahan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali. Ruang tidak lagi ramah terhadap masyarakat penghuninya khususnya pada kasus-kasus ekstrim seperti gempa bumi dan tsunami. Pada kenyataannya, banyak ditemui di lapangan bangunan/ rumah yang didirikan di kawasan tepian laut/ pesisir tidak mempedulikan lingkungan sekitarnya yang nota bene adalah kawasan tepian laut/ pesisir. Tata letak bangunan dan atau kelompok bangunan didirikan sejajar garis pantai (long shore line) dan bukan tegak lurus (cross shore line) sehingga kawasan pantai yang dirancang tidak berbasis mitigasi bencana (gempa bumi dan tsunami).

Livabilitas Ruang Kawasan Tepian Laut/ Pesisir

Menurut Pacione (1997) ruang kawasan yang hidup/ aktif (livable) ditunjukkan oleh bagaimana ruang kawasan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup penggunanya. Tingkat livabilitas ruang kawasan juga ditentukan oleh intensitas interaksi (kegiatan) pengguna ruang kawasan tersebut (Alexander, 1965). Ruang Kawasan Tepian Laut/ Pesisir memiliki peluang besar untuk menjadi pusat kegiatan publik. Tingkat livabilitas kawasan tepian laut/ pesisir bahkan dapat dimaksimalkan hingga 24 jam ketika ruang kawasan ini didesain dengan berbagai tema kegiatan publik yang dilakukan pada waktu yang berbeda (Gambar 1). Hal tersebut dapat dilakukan karena potensi kawasan tepian laut/ pesisir dapat memanfaatkan atraksi yang sudah disediakan oleh alam. Oleh karena itu penyelesaian ruang kawasan tepian laut/ pesisir yang ditujukan agar tingkat livabilitasnya menjadi tinggi, harus diorientasikan ke arah pelestarian alam yang bersinergi dengan dibangunnya fasilitas rekreasi (amenitas) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

Masyarakat yang berkunjung ke kawasan tepian laut/ pesisir pada hakikatnya memiliki tujuan ingin menikmati suasana (atmosfir) yang khas yang hanya dapat diperoleh di kawasan tepian laut/ pesisir. Kegiatan yang dilakukan secara intensif oleh publik pada hakikatnya dipicu oleh adanya pergerakan (movement) manusia di kawasan tersebut. Pergerakan manusia dapat diciptakan melalui keberadaan dan penempatan elemen ruang publik berupa land mark (tugu, menara, gardu pandang), street furniture (kursi taman, penanda/ signage, vegetasi) dan ground covering material (paving block, rumput). Fungsi dari elemen ruang publik tersebut selain sebagai pengarah ruang juga dapat berfungsi sebagai pembentuk dan pemisah ruang dengan ruang publik yang lain. Keberadaan elemen ruang publik tersebut dapat meningkatkan livabilitas ruang karena dialog pengunjung ruang publik dengan elemen tersebut akan memperjelas di mana dan kapan seseorang berada dan ke mana seseorang akan menuju.

Pada banyak kasus pengembangan ruang kawasan tepian laut/ pesisir masih belum

mendapatkan perhatian secara khusus dan justru cenderung terbengkalai. Kondisi tersebut telah memicu kegiatan kontra produktif yang semakin memperburuk kualitas kawasan tepian laut /pesisir. Penyalahgunaan (mal-function) ruang kawasan tepian laut/ pesisir terjadi diakibatkan oleh tidak ada/ lemahnya peraturan tata ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait selain itu penegakan peraturan (jika ada) yang belum dilaksanakan secara maksimal (Gambar 3). Banyak kasus pembangunan ruang kawasan tepian laut/ pesisir diorientasikan pada fungsi baru yang tidak ada hubungannya dengan pantai dan laut. Ironisnya pengguna fungsi-fungsi baru sangat menikmati fungsi baru yang dicabut dari habitat ruang kawasan tepian laut/ pesisir.



**Gambar 3.** Alih fungsi guna lahan kawasan tepian laut/pesisir sebagai tapak bangunan hotel dan restoran dengan cara reklamasi di pantai Teluk Dalam, Nias Selatan. (Sumber: Survei 2015).

#### *Mindset* Kawasan Tepian Laut/ Pesisir

Kawasan tepian laut/ pesisir berorientasi pada pemanfaatan ruang yang memosisikan laut sebagai partner dialog keruangan. Dialog keruangan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Secara fisik bangunan dan atau kelompok bangunan yang diciptakan perlu 'berjarak' terhadap tepian laut karena sebagai sosok baru keberadaan bangunan akan mengganggu keseimbangan lingkungan yang ada baik secara fisik, spasial maupun visual. Terminologi 'berjarak' tersebut dapat diterjemahkan dalam bentuk ditentukannya sempadan pantai yang menentukan letak bangunan atau kelompok bangunan terhadap

laut. Pada kasus lain bangunan yang berada di tepian laut perlu didesain secara khusus sehingga bangunan tersebut tidak hanya mampu berfungsi secara sosial dan atau ekonomi namun juga mampu berfungsi secara kultural sesuai dengan denyut kehidupan komunitasnya dalam konteks kawasan tepian laut/ pesisir.

Secara ekologis bangunan yang dihadirkan perlu diorientasikan terhadap alam laut sekaligus dipersiapkan strategi keruangannya untuk mampu mengantisipasi ancaman gempa dan tsunami secara memadai. Usaha pembangunan kawasan tepian laut/pesisir memerlukan pula *treatment* khusus guna menghindarkan kawasan tepian laut / pesisir terpapar polusi khususnya sampah. Pemberlakuan sempadan pantai dan tata letak bangunan dan atau kelompok bangunan dalam konteks laut dimaksudkan agar alam tetap diposisikan sebagai magnet utama dan titik pusat perhatian (*point of interest*) untuk menarik pengunjung di kawasan tepian laut/ pesisir sebagai ruang publik. *View* terhadap alam khususnya matahari (*sun*), laut (*sea*) dan pasir (*sand*) perlu diciptakan sebagai daya tarik kawasan tepian laut/ pesisir. Namun di sisi lain setting bangunan harus tetap merespon terkait mitigasi bencana.

Pada praktiknya, selain bangunan tidak ditata untuk merespon mitigasi bencana ternyata juga secara empiris laut tidak menjadi *point of interest*. Justru akses ke laut tidak dibuka baik secara spasial maupun visual. Banyak kasus di lapangan menunjukkan kecenderungan yang seragam yaitu orientasi bangunan tidak lagi mengarah ke laut namun ke arah daratan. Hal itu terjadi karena masih ada *mindset* kemudahan akses menuju bangunan dan atau kelompok bangunan ditentukan oleh keberadaan jalan. Sementara ruang sempadan laut yang seharusnya dibebaskan dari keberadaan bangunan dan atau kelompok bangunan justru dipadati oleh bangunan sehingga jalan yang ada menjadi diapit oleh 2 (dua) deretan bangunan memanjang sepanjang pantai. Akibatnya selain akses ke laut menjadi tertutup juga laut akan diposisikan menjadi bagian belakang dari bangunan dan atau kelompok bangunan. Hal tersebut menyebabkan kondisi pantai dan laut menjadi cenderung tidak terawat, kotor, dan kumuh serta rusak akibat sampah yang diproduksi dibuang begitu saja di laut. Hal ini terjadi akibat dari keberadaan laut diposisikan sebagai bagian belakang bangunan dan atau

kelompok bangunan. Hal tersebut tentu saja akan memperburuk kualitas ruang dan lingkungan kawasan tepian laut/ pesisir.

Di pihak lain fenomena alih-alih perbaikan kualitas kawasan pantai/ pesisir kegiatan reklamasi pantai justru mengakibatkan degradasi kualitas ruangawasannya. Reklamasi pantai memiliki konsekuensi ekologis yang memerlukan perhitungan tertentu terkait dengan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh reklamasi tersebut. Berkurangnya ruang sempadan pantai tentu akan berpengaruh terhadap berubahnya letak garis pantai (khususnya untuk kasus pantai yang landai/dangkal) ketika air laut pasang atau surut. Hal tersebut akan menyebabkan pantai tidak dapat difungsikan untuk aktivitas yang memerlukan kedalaman pantai tertentu.

#### Pembangunanberbasis Kawasan Tepian Laut/ Pesisir (*Sea Front Based Development*)

Menambahkan apa yang dikemukakan oleh Pacione (1997) mengenai *ideal sustainable community* di atas Jones dan Silva (1991) menyatakan bahwa model integrasi komunitas dan lingkungan binaan sangat efektif dalam memecahkan persoalan lingkungan binaan khususnya kawasan tepian laut/ pesisir. Faktor penting dalam model yang dimaksud di atas adalah sistem interaksi antara manusia dan lingkungan tepian laut/ pesisir yang dibangun guna memperoleh kondisi lingkungan binaan yang diharapkan. Pada kasus komunitas tradisional, permukiman yang dibangun menganut pola interaksi keseimbangan yang harmonis. Hal itu direfleksikan dalam bentuk interaksi antara manusia dan alam dalam bentuk interaksi kosmologis dan ekologis kelautan.

Masyarakat tradisional telah memiliki kearifan lokal dalam membangun ruang huniannya yang sangat memperhatikan alam sehingga bangunan apa harus ditempatkan di mana sudah diatur di dalam sistem budayanya. Seiring dengan kemajuan jaman pemahaman kearifan lokal yang berbasis budaya lokal sudah mulai luntur oleh kepentingan dan kebutuhan ekonomi yang lebih pragmatis.

Model yang dikembangkan Jones dan Siva (1991) memfokuskan model integrasi komunitas dan lingkungan binaan dalam konteks pembangunan kawasan tepian laut/ pesisir perlu memperhatikan 6 (enam) hal yaitu :

- (1). kemajuan (*advancement*);
- (2).perbaikan(*betterment*);
- (3). peningkatan kapasitas (*capacity building*);
- (4). pemberdayaan (*empowerment*);
- (5). peninggian capaian(*enhancement*)dan
- (6). pendampingan (*nurturing*).

Dalam konteks kawasan tepian laut/ pesisir ke enam hal tersebut di atas perlu menjadi orientasi sehingga usaha dalam merealisasikan kawasan tepian laut / pesisir yang ideal perlu didukung oleh perbaikan kawasan yang konsisten dengan dilandasi oleh orientasi kelautan guna meningkatkan capaian yang dituju dengan tetap dilakukan pemberdayaan yang menerus dari pihak yang kompeten.

Pada kenyataannya masyarakat kawasan tepian laut/ pesisir khususnya yang kehidupannya masih terbelakang memiliki tingkat sosial yang relatif rendah. Keterbatasan masyarakat kawasan tepian laut/ pesisir dalam hal pemikiran dan pemahaman tentang perlunya melindungi habitat kawasan tepian laut/ pesisir akan mengancam kawasan tepian laut/ pesisir yang seharusnya dipertahankan eksistensinya. Di pihak lain masyarakat kawasan tepian laut/ pesisir sering dihadapkan pada ketidakberdayaan terhadap superioritas pemilik modal dalam mengolah kawasan tepian laut/ pesisir. Hal itu menyebabkan komunitas tradisional justru sering terjebak menjadi bagian dari pihak yang berperan serta merusak alam kawasan tepian laut/ pesisir karena alasan ekonomi. Kasus penambangan pasir pantai ilegal di beberapa tempat di Indonesia adalah sebagian dari contoh kondisi tidak harmonisnya hubungan alam dan manusia.

#### Kesimpulan

Kawasan tepian laut/ pesisir pada dasarnya merupakan kawasan yang sensitif terhadap perubahan akibat rekayasa pembangunan yang dilakukan. Sensitifitas tersebut terkait dengan karakter area yang berbeda antara daratan dan lautan. Namun pengembangan kawasan tepian laut/ pesisir tidak berarti merupakan program yang tidak perlu dijalankan. Revitalisasi kawasan tepian laut/ pesisir sangat penting guna



meningkatkan kualitas lingkungan binaan dengan mengimplemetasikan konsep membangun tanpa merusak alam dan budaya.

Keseriusan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan tepian laut/ pesisir tanpa merusak alam dan budaya tersebut bermanfaat untuk merespon kriminalisasi kawasan tepian laut/ pesisir. Respon dalam bentuk de-kriminalisasi kawasan tepian laut/ pesisir sebagai ruang publik tersebut perlu disertai oleh aplikasi strategi pengembangan kawasan tepian laut/ pesisir dengan menekankan dan memprioritaskan 6 (enam) aspek yaitu

- (1) Pelestarian Kawasan Tepian Laut/ Pesisir (*Sea Front*),
- (2) Sustainability Kawasan Tepian Laut/ Pesisir (*Sea Front*);
- (3) Keaslian (*authenticity*) Kawasan Tepian Laut/ Pesisir (*Sea Front*);
- (4) Livabilitas Ruang Kawasan Tepian Laut/ Pesisir;
- (5) *Mindset* Kawasan Tepian Laut/ Pesisir dan
- (6) Pembangunan berbasis Kawasan Tepian Laut/ Pesisir (*Sea Front Based Development*).

Selain itu upaya de-kriminalisasi ruang publik di kawasan tepian laut/ pesisir dengan mengedepankan keenam aspek tersebut di atas juga harus dilakukan dengan semangat yang kuat dan arah orientasi pengembangan kawasan tepian laut/ pesisir yang jelas serta dikembangkan berdasarkan persepsi yang sama tanpa harus mengorbankan kawasan tersebut. Selanjutnya, keenam aspek tersebut perlu dikemas dalam satu sistem kebijakan pengembangan kawasan pantai/ pesisir secara terpadu. Hal ini seiring dengan pengembangan kawasan tepi laut/ pesisir sebagai area yang dikelola menggunakan *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM).

Penelitian ini meskipun telah merumuskan strategi pengembangan kawasan tepian laut/ pesisir di Indonesia, namun belum menyentuh hal-hal yang lebih mendetil terkait dengan

kasus-kasus di lokus tertentu dalam bentuk arahan desain (*design guide line*). Untuk itu perlu dilakukan penelitian lanjutan di titik-titik lokasi kawasan tepian laut/ pesisir di Indonesia guna mendasari dirumuskannya arahan desain kawasan tepian laut/ pesisir yang kontekstual.

### Ucapan Terima Kasih

Paper ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan yang diberikan oleh Dekan Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan fasilitas dalam rangka pelaksanaan penelitian baik pada saat survei maupun analisis data pada kurun waktu 2014-2015. Selain itu, penelitian ini juga tidak dapat lepas dari dukungan Prof. Dr. Yasufumi UEKITA dari *University of Tsukuba*, Jepang sehingga peneliti memperoleh kesempatan untuk berkunjung ke Yokohama dalam rangka melakukan survei di *Harbour Front City* of Yokohama dan diskusi mendalam tentang kawasan tepian laut di Jepang pada 2014. Bantuan dan kontribusi yang diberikan oleh sdr. Fani Atmanti, Mr. Mark Flint dan komunitas nelayan pantai Lagundri, Nias Selatan sangat bermanfaat dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Untuk itu semua diucapkan terima kasih pada semua pihak tersebut di atas atas segala bantuan dan dukungannya sehingga penelitian tentang kawasan tepian laut/ pesisir dapat diselesaikan dengan baik.

### Daftar Pustaka

- Alexander, C. (1965) . 'A city is not a tree', *Architectural Forum* 122
- Berry, Brian J.L., Edgar C. Conkling and D. Michael Ray (1993). *The Global Economy : Resource Use, Locational Choice and International Trade*, New Jersey : Prentice Hall
- Doaly, Themmy, 2013, *Khawatir Akses Pantai Ditutup, Nelayan Manado Protes Pemasangan Seng*, (<http://www.mongabay.co.id/2013/10/08/khawatir-akses-pantai-ditutup-nelayan-manado-protas-pemasangan-seng/>)
- Jones, B. and J. Silva, (1991). *Problem Solving, Community Building, and Systems Interaction: An Integrated Practice Model for Community Development*. *Journal of the Community Development Society*. Vol. 22, No. 2: 1-21
- Pacione, M. (1997). *Britain's Cities, Geographies of Division in Urban Britain*, Routledge, London.

Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir melalui De-Kriminalisasi Ruang Publik

Preston, Christine, 2008, Social Continuity and Change, and Social Theory, (<http://anthropology-bd.blogspot.co.id/2008/07/social-continuity-and-change-and-social.html>)

Utomo, Tri Widodo W. (2009), Keseimbangan Kepentingan Ekonomis dan Ekologis dalam Menunjang Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), makalah, <http://nurma.staff.uns.ac.id/files/2009/03/keseimbanganekoneksi-1.pdf>